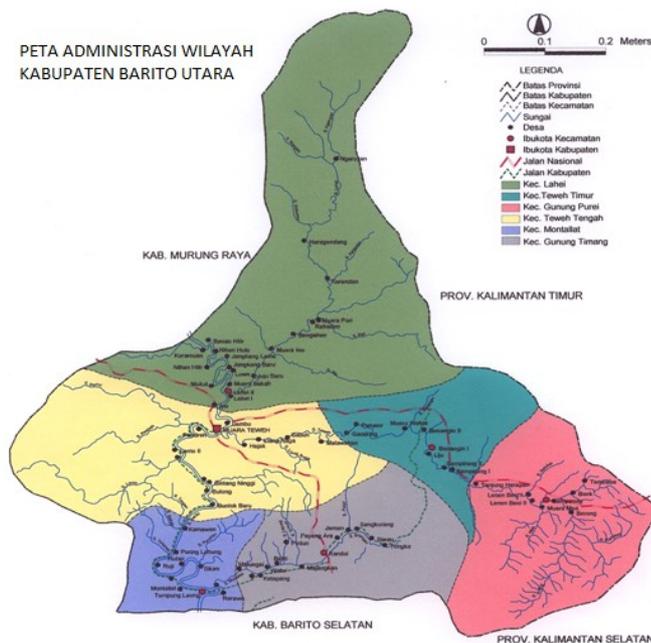


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pemerintahan Kabupaten Barito Utara

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara



Sumber: Dinas Perkerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara di akses melalui <http://baritoutarakab.go.id/> pada jam 13.21 Wib, tanggal 18 September 2015.

Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara geografis terletak pada posisi $20^{\circ}20'3,32''$ - $115^{\circ}50'47''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}49'00''$ Lintang Utara - $1^{\circ}27'00''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas; sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat

Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara berdasarkan data publikasi BPS Barito Utara tahun 2011 adalah 8.300 Km² (830.000 Ha) atau 5,4% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administrasi Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barito Utara, Berdasarkan data Barito Utara Dalam Angka Tahun 2013 Kecamatan Lahei merupakan kecamatan yang paling luas dengan wilayah 14,12% dari luas Kabupaten Barito Utara, sedangkan Kecamatan Teweh Timur paling sempit dengan luas 5,20% dari luas wilayah Kabupaten Barito Utara.

Secara rinci luas masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kecamatan Montallat luasnya 553,00 km² atau 6,66% dari luas Kabupaten Barito Utara.
2. Kecamatan Gunung Timang luasnya 890,00 km² atau 10,72% dari luas Kabupaten Barito Utara.
3. Kecamatan Gunung Purei luasnya 1.158,00 km² atau 13,95% dari luas Kabupaten Barito Utara.
4. Kecamatan Teweh Timur luasnya 432,00 km² atau 5,20% dari luas Kabupaten Barito Utara.
5. Kecamatan Teweh Tengah luasnya 1.008 km² atau 12,14% dari luas Kabupaten Barito Utara.

6. Kecamatan Lahei luasnya 1.172,00 km² atau 14,12% dari luas Kabupaten Barito Utara.
7. Kecamatan Teweh Baru luasnya 1.119,00 km² atau 13,48% dari luas Kabupaten Barito Utara.
8. Kecamatan Teweh Selatan luasnya 827,00 km² atau 9,96% dari luas Kabupaten Barito Utara.
9. Kecamatan Lahei Barat luasnya 1.141,00 km² atau 13,75% dari luas Kabupaten Barito Utara.

(Sumber: *Lakip Dinas PU Kab. Barito Utara tahun 2013-2018*)

1. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2012 (per 31 Desember 2012) adalah 178.789 jiwa berdasarkan registrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Sensus Penduduk oleh BPS Barito Utara jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 121.573 jiwa, tahun 2011 berjumlah 123.602 jiwa dan tahun 2012 berjumlah 123.781 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 15 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Teweh Tengah sebagai kecamatan terpadat dan Kecamatan Gunung Purei adalah kecamatan terjarang penduduknya. Persentase jumlah penduduk Barito Utara berkisar 18,10% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu tahun 2003-2010 pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Utara terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 1,19% setiap tahunnya. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 108, yang artinya penduduk laki-laki di kabupaten ini

8% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. (Sumber: *Lakip Dinas PU Kab. Barito Utara tahun 2013-2018*)

Tabel 2.1
Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Montalat	553	10939	20
2	Gunung Timang	889	10315	9
3	Teweh Timur	1158	2495	10
4	Teweh Tengah	1008	43411	43
5	Teweh Baru	1119	17308	15
6	Teweh Selatan	827	13014	16
7	Lahei	1618	12127	7
8	Lahei Barat	1141	9832	9
	Barito Utara	8830	125400	14

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2014

2. Tenaga Kerja dan pengangguran

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan proses pengembangan itu sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan adalah apabila sumber daya manusia diusia produktif banyak yang mengalami pengangguran. Hal ini tentunya mengakibatkan terbentuknya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian sendiri.

Tabel 2.2
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2014

Jenis Kegiatan Utama	Perkotaan	Pedesaan
A. Angkatan Kerja	16420	50796
1. Bekerja	15783	49191
2. Pengangguran terbuka	637	1605

B. Bukan Angkatan Kerja	8710	13062
1. Sekolah	3066	2672
2. Mengurus rumah tangga	4914	8635
3. Lainnya	730	1755
Jumlah	25130	63858

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2014

Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa angka pengangguran didesa lebih tinggi daripada perkotaan pada tahun 2014. Jumlah pengangguran di perkotaan berjumlah 637, sementara di pedesaan 1.605. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan di pedesaan sehingga banyak penduduk yang menjadi pengangguran.

B. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis harus mengembangkan paradigma baru sesuai dengan tuntutan perubahan yang diamanatkan masyarakat maupun birokrat dalam rangka menjawab tuntutan reformasi. Sejalan dengan itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi kepada pelayanan yang baik, sehingga diperlukan :

a. Koordinasi, Kerjasama dan Kebersamaan

Terjadinya koordinasi, kerjasama dan kebersamaan antara staf, antara instansi dan para stakeholders yang lain dalam pencapaian visi dan misi.

b. Profesional dan Inovatif

Melaksanakan pengelolaan jalan/jembatan, sumber daya air secara profesional dan inovatif melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi.

c. Efisien dan Efektif

Efisien dalam penggunaan waktu dan biaya, efektif dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan kebutuhan secara prioritas.

d. Tanggung Jawab/ Akuntabilitas

Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dipertanggungjawabkan.

e. Disiplin dan Transparansi

Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian dan kesadaran serta tersosialisasikan secara transparan kepada masyarakat.

1. Visi dan Misi

1. Visi Dinas Pekerjaan Umum

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar dapat selalu konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka menggambarkan perwujudan terhadap keadaan yang diinginkan (dicita-citakan) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Prasarana Fisik yang handal, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara ini, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut : Terwujudnya : mengandung makna bahwa Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Barito Utara akan memenuhi dan mewujudkan kebutuhan dimasa sekarang dan mendatang. Prasarana Fisik yang handal, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat: mengandung arti bahwa Dinas Pekerjaan Umum memberikan sesuatu pelayanan jaringan jalan dan jembatan, sumber daya air dan bangunan pengairan serta konservasi sungai, perumahan dan permukiman, fasilitas umum, penataan ruang dalam kondisi yang mantap dan handal (berkualitas dengan spesifikasi bentuk-bentuk pelayanan dengan segala aspeknya secara terus menerus memberikan kepuasan), merupakan satu kesatuan sistem pelayanan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dilaksanakan secara terus menerus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

2. Misi Dinas Pekerjaan Umum

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dengan baik instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dan mengetahui fungsi-fungsi pokok serta program-programnya serta hasil yang diinginkan dimasa yang akan datang.

Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung

pencapaiannya oleh stakeholders terkait, maka misi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui prasarana fisik yang handal, serta membuka keterisolasian wilayah ;
- b. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya air dan pengairan yang layak/ terintegrasi;
- c. Mewujudkan prasarana transportasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat ;
- d. Mewujudkan prasarana dan sarana kota, permukiman, lingkungan dan fasilitas publik untuk mendukung laju pembangunan perkotaan/ perdesaan
- e. Mewujudkan pembangunan kawasan/ wilayah yang teratur dan seimbang.
- f. Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang;
- g. Meningkatkan kondisi aset instansi untuk mampu meningkatkan sumber-sumber pendapat asli daerah dan menunjang pelaksanaan pembangunan.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu di bidang pekerjaan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito

Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, Tata Ruang, serta Peralatan dan Perbekalan (Alkal).

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan di bidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.

- c. Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Pengelolaan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Dinas Pekerjaan Umum Barito Utara.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara, maka Susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbag. Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
 - b. Subbag. Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategik, rencana kinerja tahunan dan LAKIP Dinas.
 - c. Subbag. Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan dinas.
3. Bidang Bina Marga yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan teknis, survey, pengawasan, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembangunan, peningkatan/penggantian dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

4. Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Cipta Karya yang meliputi pengelolaan perizinan bangunan, perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan perumahan dan pemukiman serta penyehatan lingkungan.

Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Bangunan dan Tata Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan rencana dan pengawasan program kerja penataan dan pendataan gedung pemerintah, rumah dinas lingkungan dan perumahan lainnya.
 - b. Seksi Perumahan dan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan segala usaha yang berkenaan dengan penyehatan lingkungan dan air bersih.
5. Bidang Sumber Daya Air yang dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan pengairan, operasi dan pemeliharaan, penambangan bahan galian golongan C dan pengamanan pemanfaatan air permukaan.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

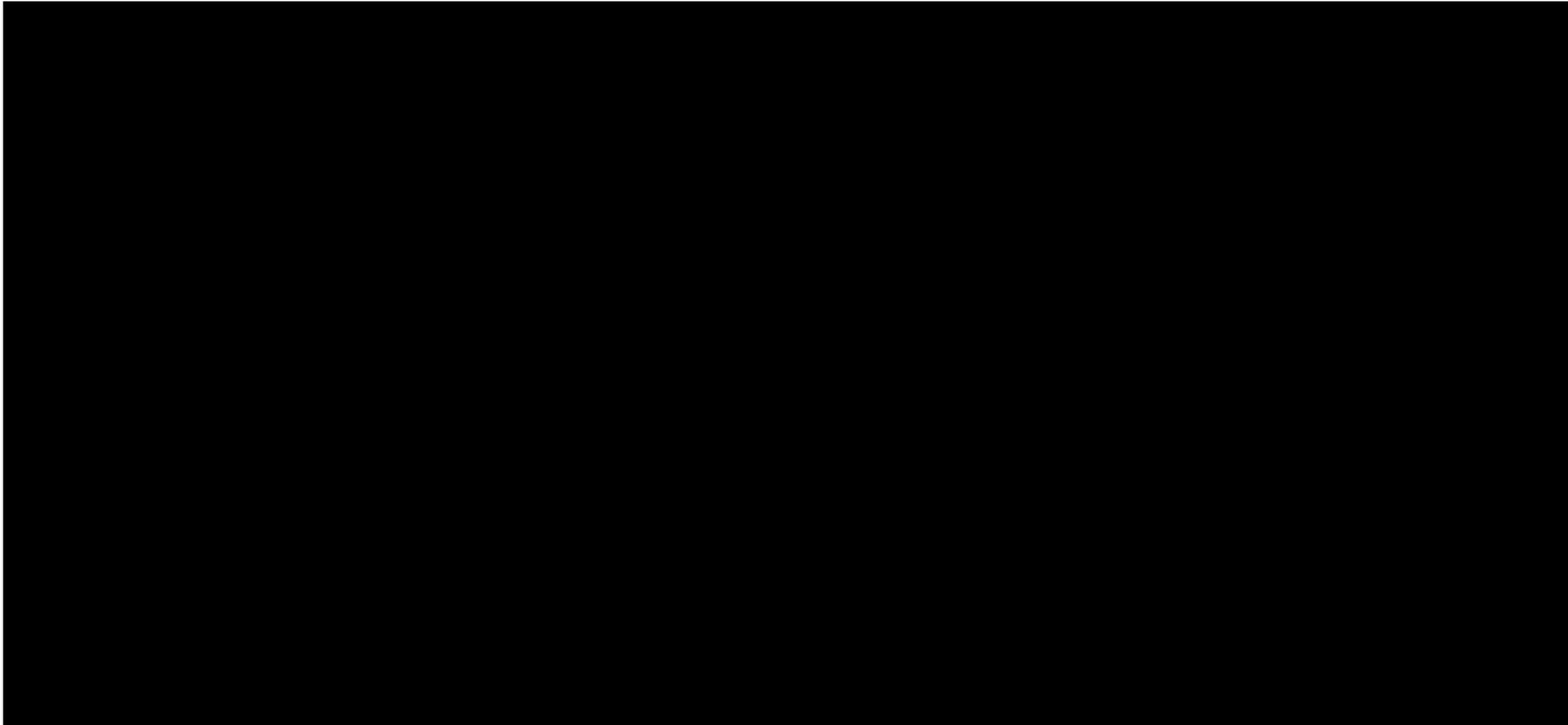
- a. Seksi Pembangunan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan dan pengamanan pengairan serta penambangan bahan galian golongan C.
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoperasian, pelaksanaan program serta pemeliharaan pengairan.
6. Bidang Alat dan Perbekalan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Alat dan Perbekalan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penggunaan dan pengelolaan peralatan, perumusan besarnya sewa dan standar sewa, pengadaan alat suku cadang, bahan bakar dan pelumas, perbaikan, pemeliharaan, perawatan dan penentuan kondisi peralatan yang layak dioperasikan, terdiri dari :
- a. Seksi Peralatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Peralatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan dan menetapkan standar sewa, penggunaan peralatan dan pengawasan penggunaannya serta menentukan kondisi layaknya pengoperasian peralatan.
 - b. Seksi Perbekalan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana program kerja perbekalan yang meliputi inventarisasi peralatan suku cadang, bahan bakar dan pelumas.
7. Bidang Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang tata ruang,

kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengawasan serta pemanfaatan tata ruang kabupaten, terdiri dari

- a. Seksi Penataan dan Pengembangan Ruang yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana penataan dan pengembangan ruang.
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan, pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Bidang Tata Kota dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Kota yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan dan perumusan rencana pengaturan kota, bangunan, pertamanan, kebersihan dan keindahan kota, terdiri dari :
- a. Seksi Kebersihan dipimpin oleh Kepala Seksi Kebersihan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan perencanaan pola induk kebersihan kota dan melaksanakan kegiatan perumusan rencana dan program kerja penataan kebersihan lingkungan dan kota.
 - b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota dipimpin oleh Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan perencanaan pengaturan pertamanan dan dekorasi kota sesuai dengan bidang dan tugasnya.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas, dalam hal ini berupa Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara



Sumber: Perda DIY No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai akhir yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Mengarah pada misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara yang telah diuraikan diatas, tujuan pembangunan sektor infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman di Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan.
5. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi.
6. Mewujudkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan• Meningkatnya kualitas sumber daya air, irigasi, penanggulangan banjir dan fasilitas publik
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih• Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi permukiman• Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Tersedianya acuan peruntukan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Meningkatnya pengelolaan

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Persampahan	persampahan sehingga terciptanya lingkungan yang sehat dan Ruang Terbuka Hijau yang asri
Meningkatkan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi	Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia di bidang ke-PU-an dan pengembangan data dan informasi
Mewujudkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Terwujudnya peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

5. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien. Untuk dapat mendeteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor-faktor tersebut dilihat melalui pendekatan :

1. Kemampuan organisasi
2. Tugas pokok dan fungsi organisasi
3. Kondisi SDM
4. Kondisi data, studi dan informasi

5. Kemampuan penguasaan teknologi
6. Kemampuan dana
7. Etos kerja

Berdasarkan hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis dan telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal penyediaan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:

6. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara sampai dengan Bulan Juni 2015 sebanyak 132 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tenaga honorer nya berjumlah 42 orang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

No	Nama	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil	132
2	Tenaga Honorer	42
	Total	174

Sumber: Data kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara 2015

Tabel 2.4

Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2015

NO NO	Nama	Pendidikan	Jenis Kelamin	Tahun Kontrak	Jabatan
----------	------	------------	---------------	------------------	---------

1	Brinyman,ST	S1 Teknik Mesin	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis/bidang bina marga
2	Arif Anwari,ST	S1 Teknik Sipil	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang bina marga
3	Herlina Fitriani,ST	S1 Teknik Sipil	Perempuan	7 Januari 2015	Tenaga Teknis bidang bina marga
4	Nurul Wardah,ST	S1 Teknik Sipil	Perempuan	7 Januari 2015	Tenaga Teknis bidang bina marga
5	Silfia Noranyanty,ST	S1 Teknik Arsitektur	Perempuan	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang cipta karya
6	Reza Mustaqim,ST	S1 Teknik Sipil	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga Teknis bidang bina marga
7	Rina Norlianty,SE	S1 Ekonomi Akutansi	Perempuan	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang umum dan kepegawaian
8	Yodi Pranata, SI.Kom	S1 Ilmu Komunikasi	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang umum dan kepegawaian
9	Ismail Nadzary,ST	S1 Teknik Mesin	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang bina marga
10	Dedy Permana,Amd	D.III Teknik Geodesi	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang sumber daya air
11	Rizal Riyadi,Amd	D.III Teknik Geodesi	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang sumber daya air
12	Ghazali Akbar,Amd	D.III Manajemen Informatika	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang umum dan kepegawaian
13	Muhammad Syaiful Basri	SMA.IPS	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang tata kota
14	Wisnu Sanjoyo	SMA.IPS	Laki-Laki	7 Januari 2015	Tenaga teknis bidang bina marga
15	Arif Perdana,ST	S1 Teknik Sipil	Laki-Laki	1 Juni 2015	Tenaga teknis bidang bina marga
16	Ikhwanoor Sri,S.Kom	S1 Informatika	Laki-Laki	1 Juni 2015	Tenaga teknis bidang cipta karya
17	Rakhmad Darmawan, Amd	DIII Kesehatan Lingkungan	Laki-Laki	1 Juni 2015	Tenaga teknis bidang tata kota
18	Obay Sobaryan	SMA	Laki-Laki	2 November 2009	Pengawas Lapangan Kebersihan
19	M.Rozaq S.pd	S1 Pendidikan	Laki-Laki	2 November 2009	Pengawas Lapangan Kebersihan
20	Hamdani, Amd	DIII Kesehatan Lingkungan	Laki-Laki	2 November 2009	Pengawas Lapangan Kebersihan
21	Rumaini	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Pengawas Lapangan Kebersihan

22	Faizal	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Pengawas Lapangan Kebersihan
23	Zaini	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Supir Dump Truck Kebersihan
24	Suherman	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Supir Dump Truck Kebersihan
25	Taupik	SD	Laki-Laki	3 Januari 2011	Supir Truck Countainer Kebersihan
26	Wahyu Ramadhan	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Pengawas Lapangan Kebersihan
27	Raziv Khamal	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Pengawas Lapangan Kebersihan
28	Bariadi	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Pengawas Lapangan Kebersihan
29	Taupik Ibrahim	SMA	Laki-Laki	3 Januari 2011	Pengawas Lapangan Kebersihan
30	A.Sugesti	SMP	Laki-Laki	3 Januari 2011	Sopir Penyapu Jalan
31	Muhammad Fahruzi	SMA	Laki-Laki	7 November 2014	Keamanan
32	Muhammad Rafii	SMA	Laki-Laki	7 November 2014	Keamanan
33	Syaipandi	SD	Laki-Laki	7 November 2014	Keamanan
34	Salepo	SD	Laki-Laki	7 November 2014	Keamanan
35	Sumito	SMA	Laki-Laki	7 November 2014	Keamanan
36	Muliadi	SMA	Laki-Laki	7 November 2014	Keamanan
37	Kariyem	SD	Perempuan	7 November 2014	Kebersihan
38	Firmansyah	SMP	Laki-Laki	7 November 2014	Tenaga Teknis
39	Ipol Adrak	SMP	Laki-Laki	7 November 2014	Tenaga Teknis
40	Zainal Abidin	SMA	Laki-Laki	7 November 2014	Tenaga Teknis
41	Aditya	SMA	Laki-Laki	7 November 2014	Supir
42	Ely Kartina	SMA	Perempuan	7 November 2014	Pelatih Senam